

Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Profesi Guru

Asmaria Hasibuan¹, Dea Ayu Puspita², Kokoh Sabila³, Muhammad Iqbal⁴, Titi Nuraini⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Asmariahsb80@gmail.com¹, deaayupuspita06@gmail.com², bilko76@gmail.com³,
iqbalmpi08@gmail.com⁴, tnuraini23@gmail.com⁵

Abstrak

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran guru sangat jelas dan tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional. Maka dari itu, pembinaan dan peningkatan profesi guru harus selalu menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dalam meningkatkan profesi guru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan dalam meningkatkan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hukum serta dengan adanya Pendidikan Profesi Guru, guru menjadi lebih memiliki kedudukan dan profesionalitas sebagai guru.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Profesi Guru*

Abstract

Teachers have a very important role in carrying out functions and realizing national educational goals. The role of the teacher is very clear and cannot be replaced by anything else, especially in a multicultural and multidimensional society. Therefore, coaching and improving the teacher profession must always be the top priority. This study aims to analyze educational policies in improving the teacher profession. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of case study approach. The results of this study show that with the existence of educational policies in improving the teacher profession, the position of teachers is increasingly shaded by legal sources and with the existence of Teacher Professional Education, teachers become more positioned and professional as teachers

Keywords: *Education Policy, Teacher Profession*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai sarana sosialisasi merupakan kegiatan manusia yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga usia pendidikan hampir sama dengan usia manusia dalam berbagai rentang peradaban. (Wardiman Djojonegoro: 1996: 1).

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, akan terbentuk individu-individu yang berkarak terbaik, dengan karakter individu yang baik akan terbentuk masyarakat yang baik, dan dengan karakter masyarakat yang baik, maka akan terbentuk karakter bangsa dan Negara yang baik pula. Keberadaan dan kejayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya

sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. (Doni Koesoema, 2007). Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya (hati, pikir, rasa dan karsa) untuk menghadapi masa depan. (Muchlas Samani & Hariyanto, 2012)

Pendidikan Nasional diselenggarakan secara terprogram, berjenjang, berkelanjutan, dan sangat fundamental bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, taraf hidup, kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia, dan martabat bangsa Indonesia. Maksud dan tujuan dari pendidikan Nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Hal tersebut menuntut dukungan kemampuan kerja dari segenap pelaksana pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif, sehingga mampu menciptakan proses belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri, serta berkembangnya budaya belajar agar tumbuh sikap dan prilaku yang kritis, kreatif, inovatif, dan produktif serta mendorong keinginan untuk maju. Menciptakan manusia-manusia seperti yang diharapkan tidak lepas dari peranan tenaga guru sebagai tenaga pengajar dalam konteks pendidikan formal.

Dalam hal ini, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal sangatlah penting dan berperan dalam memajukan sumber daya manusia karena di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, maka harus ada seorang pemimpin yang dapat mengatur dan mengelola kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Seorang pemimpin dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai "guru". Secara sederhana, Wahjosumidjo mendefinisikan guru sebagai pemimpin (manager) adalah: "seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin proses pembelajaran bagi peserta didik yang diselenggarakannya, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran". (Wahjosumidjo;1999:83).

Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dan memajukan potensi dirinya menjadi manusia yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut keahlian dan kemamuan semua bidang kehidupan. Sebagaimana Munawar Soleh menjelaskan bahwa Pendidikan merupakan peran yang sangat penting, karena pendidikan akan mampu meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga sumber daya alam yang ada di tanah air akan terolah dengan baik (Munawar Soleh,2005).

Di dalam kegiatan belajar mengajar, kualitas pembelajaran terletak kepada guru karena memegang peranan yang sangat penting walaupun unsur-unsur lain ada seperti; kurikulum, tata usaha dan sarana prasarana juga dapat mendukung kualitas pembelajaran tersebut. Namun walaupun guru sangat mendukung di dalam pendidikan dan pengajaran, akan tetapi peran aktif sebagai pemimpin di kelas sangat dibutuhkan. Sebab guru merupakan "motor penggerak" bagi para siswa. Untuk itu guru harus mampu mengatur dan menstimulir para siswanya dalam mengembangkan metode mengajar dan memberikan motivasi dalam hal pelaksanaan tugas belajar dan tugas-tugas lain di sekolah, dengan demikian peranan guru sebagai manajer amatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan peranan guru menjadi sangat dibutuhkan terutama dalam proses ajar mengajar. Guru adalah seorang pendidik profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta didalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi yang lain. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting bagi masyarakat, demi maju

mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut (Roestiyah N.K, 2001).

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Pendidikan merupakan hal penting dalam membangun Negara untuk menjadi lebih baik dan maju, bertujuan untuk mengembangkan individu-individu yang mumpuni dalam mengembangkan pendidikan, ekonomi, dan lainnya. UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar pentransferan ilmu dari pendidik ke peserta didik (UU Sisdiknas dan Peraturan Pelaksanaannya, 2004). Proses pendidikan terdiri dari proses input yaitu aktifitas peserta didik melakukan belajar, didalam proses belajar mengajar dan proses output yaitu hasil dari proses belajar mengajar. Dari proses diatas diharapkan menghasilkan peserta didik berkualitas yang mampu menghadapi persaingan global.

Kebijakan pendidikan khususnya kebijakan tentang Pengembangan dan peningkatan profesi guru setidaknya harus memenuhi tantangan dan tuntutan global dan perkembangan jaman sebagaimana diungkapkan oleh Fattah & Latifah (2012:145) bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana Negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global kebijakannya.

Faktor-faktor pendidikan merupakan unsur penting dalam menunjang pendidikan, mencapai tujuan pendidikan yang sistematis. Beberapa faktor yang menunjang pendidikan sebagai berikut seperti faktor tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum atau materi pendidikan, alat pendidikan, metode pendidikan, lingkungan, yang masing-masing saling berkesinambungan dan saling timbal balik dalam pelaksanaan pendidikan.

Perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada zaman modern ini adalah masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, kemudian upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut di antaranya adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan merupakan salah satu keilmuan dan lain sebagainya. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya.

Dalam lembaga pendidikan guru sebagai pemimpin (manager) yang memberikan materi pelajaran dan sekaligus sebagai pendidik agar anak pintar dan juga berakhlak mulia (terpuji). Jadi jelas seorang pemimpin mempunyai tugas sebagai manajer yang menggerakkan semua orang yang terkait agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (teacher) seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing (counselor), dan manajer belajar (learning manager) (Rahendra Maya, 2013: 284)

Dengan demikian seorang guru harus menguasai berbagai kompetensi baik pedagogis, kepribadian, sosial kemasyarakatan maupun Profesional. Sebagaimana dikemukakan oleh Wursanto, bahwa guru dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari segi fungsi yang tidak tampak dalam struktur organisasi.

Isu Kebijakan Pendidikan

Dalam Kebijakan Peningkatan Guru ini banyak dibahas mengenai isu tentang peningkatan dan pengembangan profesi guru yang sekarang berkembang di media mengenai perubahan pola PLPG menjadi PPG. Menurut Wahab (2012:95) bahwa lingkup analisis kebijakan publik (*public policy analysis*), makna yang terkandung dalam terminologi "isu" bukanlah seperti apa yang umumnya dipahami oleh orang awam dalam perbincangan sehari-hari.

Jadi pada intinya isu-isu kebijakan (*policy issues*) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para pemangku kepentingan mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Peningkatan Guru Profesi

Menurut N.A. Ametambun dan Djamarah (1994:33), guru adalah semua orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tugas kemanusiaan masyarakat salah satu segi dari tugas guru, sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dalam kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial.

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan, tetapi pada kenyataannya sekarang ini banyak yang bukan lulusan kependidikan menjadi guru yang seharusnya profesi guru dipegang oleh orang dari lulusan pendidikan. Hal ini dikarenakan orang yang dari nonkependidikan dapat mengambil akta empat dengan leluasa sehingga dapat

mengajar disuatu lembaga pendidikan, itu sebabnya sekarang jenis profesi guru ini paling mudah terkena pencemaran karena sembarang orang dapat menjadi guru dan mengajar.

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho melihat proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas, terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya. Proses pemberdayaan tenaga pendidik dan peserta didik berarti menghormati kebersendirian dari pribadi manusia dan bukan merampas hak-hak asasinya dan martabat tenaga pendidik dan peserta didik sebagai manusia (Tilaar & Nugroho, 2012:45).

Untuk menghindari kesalahankesalahan guru sebagai pengajar, maka dari itu guru memperbanyak wawasan pengetahuan tentang peran guru dan wawasan tentang siswa ssebagai manusia yang terdidik. Pembelajaran bila berorientasi pada guru dan utamanya pada anak didik maka pembelajaran akan bersifat efektif.

Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut Rostiyah dalam Djamarah (2010 : 36) mengemukakan bahwa fungsi dan tugas guru profesional adalah : Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita.

Pendidikan profesional guru adalah mengembangkan dan membekali lulusan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran sehingga lulusan menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada program pendidikan profesi guru adalah kompetensi profesional (ReDesain Pendidikan Profesional Guru: 2010).

Pendidikan profesional guru dapat dilalui melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru membekali dan mengembangkan kompetensi profesional melalui praktik mengajar pada seting otentik lapangan dengan mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S1. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, yakni dosen PPG yang memenuhi persyaratan.

Terdapat 11 persyaratan minimal dosen PPG, baik yang bersifat administrasi maupun kompetensi, persyaratan tersebut adalah: (1) jenjang Pendidikan minimal S2; (2) memiliki latar belakang kependidikan; (3) memiliki bidang keahlian kependidikan; (4)lektor; (5) masa Kerja minimal lima tahun; (6)memiliki Sertifikat dosen; (7) memiliki Sertifikat dosen PPG bidang studi; (8) lulus penyetalaan Dosen Gurniwan Kamil Pasya, Pemukiman Penduduk Perkotaan 53 PPG; (9) memiliki kompetensi tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (10)memiliki kompetensi tentang penyusunan perangkat pembelajaran; dan (11) memiliki kompetensi supervise klinis.

Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat bagi Guru, dimana 1) Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada disekolah; 2) Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan pembelajaran disekolah; 3) Mempertajam daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada disekolah; 4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran (Ningrum, 2012).

Berdasarkan paparan diatas, Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.

SIMPULAN

Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis. Guru merupakan memegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan.

Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratoium sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Doni Koesoema. 2007. *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Djamarah. (1994). *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional
- Djamarah, SB. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Fattah, N., & Latifah, P. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maya, Rahendra. (2013). “*Esensi Guru dalam Visi-Misi Pendidikan Karakter*”. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor. Vol. 03 No. 02 Edisi Januari 2013.
- Munawar Sholeh, *Politik Pendidikan, Cet 1*, Jakarta: Institute For Public Edukation (IPE), 2005.
- Ningrum, E. (2012). *Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. Jurnal Pendidikan Geografi, 12(2), 61–70.
- Roestiyah NK., *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Samani, Muchlas, Hariyanto. 2012. *Pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sisdiknas. 2004. *Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya 2000-2004*. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Universitas Pendidikan Indonesia.(2010). *Re – Desain Pendidikan Profesional Guru*. Bandung:UPI Press.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo, 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wardiman Djojonegoro. (1996). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Winkel, WS. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia